

No. 08 TAHUN KE - 70, AGUSTUS 2023

ROHANI

Menjadi Semakin Insani



Rp 20.000,00
(Belum termasuk ongkos kirim)

Perempuan dalam Kepemimpinan Gereja

Suster Ahli Hukum, Kenapa Tidak? | Sudah Saatnya Gereja Kita Go Beyond

Febe: Wanita Mulia Mitra Pelayanan Paulus | Janganlah Berhenti Memelihara Pohon Anggur

DAFTAR ISI

○ KATA REDAKSI

1 | Perempuan dalam Kepemimpinan Gereja

Antonius Sumarwan, SJ

○ SAJIAN UTAMA

6 | Saatnya Mengaktualisasikan Potensi para Suster

Franz Magnis-Suseno, SJ

SAJIAN UTAMA

13 | Janganlah Berhenti Memelihara Pohon Anggur
Ann Hadjon, OSU

SAJIAN UTAMA

18 | Suster Ahli Hukum, Kenapa Tidak?
Nia, RGS

OLEH-OLEH REFLEKSI

23 | Filsafat-Teologi sebagai Dasar Formasi
M. Lusiani, PRR

RUANG DOA

27 | Pulang (Bagian Pertama)
Anastasia Petria

SABDA YANG HIDUP

31 | Febe: Wanita Mulia Mitra Pelayanan Paulus
Bobby Steven, MSF

ILUSTRASI COVER:

"Mother Teresa"
Oil Painting by Rajasekharan
(wikimedia.org)

CARA BERLANGGANAN:

Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah ROHANI. Harga eceran: @ Rp20.000,00 langganan 12 bulan Rp240.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka. Pembayaran Melalui: BCA 1263333300 a.n.Yayasan Basis atau BNI 146 Cab. Yogyakarta a.n. Bpk Sindhunata No. 1952000512.

KAUL BIARA

35 | Kerja Sama Sinergis Imam dan Biarawan-biarawati
Paul Suparno, SJ

BAGI RASA

41 | Sudah Saatnya Gereja Kita *Go Beyond*
Agnes Samosir, FCJ

BELAJAR TEOLOGI

46 | *Si Rukat Nakan* dalam Masyarakat Suku Karo sebagai Maria Masa Kini
Anastasia

SAHABAT LINTAS IMAN

51 | Menggugat Gereja: Tubuh Perempuan yang Hidup Membiara
Desy Putri Ratnasari, M.Sc.

SENI DAN RELIGIOSITAS

58 | Perjumpaan Berdaya Ubah: Resensi *Jesus Revolution*
F. Pieter Dolle, SJ

REMAH-REMAH

62 | Bicara dengan Hidup
Ludgeri, FCh



PENANGGUNG JAWAB
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI
Antonius Sumarwan, SJ

KOORDINATOR
Roberthus Kalis Jati, SJ

REDAKSI
Tiro Angelo Daenuwy, SJ
Antonius Bagas Prasetya A.N., SJ
Andreas Agung Nugroho, SJ

ARTISTIK
Willy Putranta
Slamet Riyadi

KEUANGAN
Ani Ratna Sari

PROMOSI
Francisca Triharyani

IKLAN
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI
Maria Dwi Jayanti
Anang Pramuryanto

HUBUNGI KAMI!

✉ Redaksi:
rohanimajalah@gmail.com
Administrasi/distribusi:
rohani.adisi@gmail.com
✉ Jl. Pringgokusuman
No. 35, Yogyakarta 55272
☎ 0274.546811, 085729548877
📍 0274.546811

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi edisi September 2023 adalah "Kesehatan Mental Kaum Religius" dan Oktober 2023 adalah "Atribut Religius". Tenggat waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

Saatnya Mengaktualisasikan Potensi para Suster

Lemahnya pendidikan intelektual mereka adalah yang membatasi kaum biarawati dari peran mereka yang semestinya pada Gereja. Selama pendidikan intelektual mereka jauh di bawah para calon imam, tak mungkin potensi mereka yang luar biasa dapat sepenuhnya diaktualisasikan. Itu berarti: kaum biarawati pun perlu secara rutin studi filsafat dan teologi di tempat yang sama dengan para calon imam. Sebagai *high quality women*, mereka harus mendapat formasi yang sama kualitasnya dengan para calon imam.

FRANZ MAGNIS-SUSENO, SJ |

Guru Besar Emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

DI INDONESIA terdapat lebih dari 6.000 biarawati. Peran mereka dalam Gereja luar biasa. Tetapi sayang, ada yang mencolok. Peran mereka dibatasi pada pelayanan. Tak ada suster dalam posisi pemimpin di Gereja Indonesia. Dalam Gereja sekarang disadari bahwa tradisi pimpinan pada segala dimensi terletak di tangan imam laki-laki perlu diubah.

Umat Katolik Indonesia sama halnya dengan umat Katolik di banyak negara lain, sangat akrab

dengan suster. Kehidupan Katolik tanpa suster sulit dibayangkan. Siapa yang bekerja bersama suster tahu bahwa mereka orang berkualitas tinggi, bermotivasi tinggi, orang yang dapat dipercayai dari segala sudut, orang yang membantu dalam sekian banyak dimensi, dan orang yang sangat dicintai oleh umat.

Akan tetapi, ada yang mencolok. Tak kelihatan ada suster yang menduduki tempat kepemimpinan dalam Gereja Indonesia. Tidak dalam KWI, tidak dalam keuskupan-



www.globalsistersreport.org

keuskupan, bahkan tidak dalam paroki-paroki di mana mereka menyediakan macam-macam pelayanan penting. Masih juga berlaku pendapat ini: "Suster melayani Romo". Sementara ini jumlah panggilan laki-laki cenderung berkurang. Maka, sangat susah mendesak agar wanita-wanita berkualitas luar biasa itu dapat sepenuhnya mengaktualisasikan kemampuan mereka dalam Gereja Indonesia. Diskursus tentang tempat perempuan, secara khusus tempat suster, dalam Gereja Indonesia hampir belum pernah dimulai.

Tempat Perempuan dalam Gereja

Diskusi tentang tempat perempuan dalam Gereja di banyak

wilayah Gereja sekarang sudah ramai. Bahwa patriarkat, yakni kekuasaan dalam semua dimensi kehidupan manusia berada di tangan laki-laki, yang begitu khas bagi Gereja-gereja kuno, baik Katolik maupun Ortodoks perlu didobrak (gereja-gereja Protestan sudah lama membongkarnya). Paus Fransiskus berulang kali mendesak agar perempuan diberi tempat dalam Gereja. Ia sendiri sudah mengangkat beberapa perempuan ke posisi tinggi dalam *Curia* Vatikan. Yang paling baru, Paus Fransiskus menetapkan bahwa Komisi Negara Vatikan—semacam pemerintahan Negara Vatikan—yang sampai sekarang hanya berisi kardinal, akan diisi juga dengan kaum awam, termasuk perempuan.

Masalah yang tetap dipersoalkan adalah apakah perempuan dapat menerima tahbisan. Sejak lebih dari empat puluh tahun dalam Gereja—yang terakhir adalah Sinode Amazonia 2019—disuarakan permintaan agar sekurang-kurangnya tahbisan diakon dibuka bagi perempuan. Sejak dua puluh tahun desakan menjadi makin kuat agar Gereja membuka diri terhadap tahbisan imam bagi kaum perempuan. Namun, dua-duanya sampai sekarang ditolak oleh para Paus.

Pernyataan tegas Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1994 menyatakan bahwa Gereja tidak berkuasa untuk memberikan sakramen imam kepada orang perempuan, dan bahwa segenap umat beriman Gereja untuk seterusnya harus menaati keputusan ini. Pernyataan Paus Yohanes Paulus II diperkuat bulan November lalu (2022) oleh Paus Fransiskus dalam suatu wawancara, “Kaum perempuan tidak boleh menerima jabatan yang memerlukan tahbisan.”

Di sisi lain, debat berjalan terus. Di Jerman, dalam *Jalan Sinodal Gereja Jerman*, mayoritas uskup minta agar hal tahbisan perempuan dibicarakan secara resmi dalam Gereja. Alasan-alasan teologis yang mendasari penolakan tahbisan perempuan amat lemah dan bukankah Yesus sendiri memberi wewenang kepada para murid-Nya bahwa, “Apa yang kalian ikat di bumi akan diikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di bumi, akan dilepaskan di surga” (Mat.

18:18)? Apakah sesudah lebih dari 2.000 tahun dalam masyarakat yang sedemikian berubah lalu keterikatan imam pada kelaki-lakian tidak dapat dilepaskan?

Mengakhiri Patriarkat di Indonesia

Dalam Gereja Indonesia patriarkat masih polos berlaku. Di masyarakat secara umum, dalam politik, di universitas-universitas, juga dalam dunia bisnis Indonesia perempuan sudah memainkan peranan yang makin besar dan diakui. Tetapi tidak demikian dalam Gereja Katolik Indonesia. Padahal segala macam kegiatan gerejani sama sekali tidak akan jalan tanpa perempuan. Kehidupan dalam paroki, misalnya, tanpa begitu banyak perempuan yang menjalankan segala macam tugas, tidak akan bisa jalan. Apalagi tanpa para suster. Akan tetapi saya tidak menemukan perempuan, termasuk suster, dalam posisi apa pun yang menentukan, yang membahas, apalagi menentukan kebijakan-kebijakan yang perlu diambil Gereja, yang memutuskan tindakan apa yang akan diambil.

Perempuan dalam Gereja Indonesia tetap hanya membantu. Bahasa Jawa “*kanca wingking*” Gereja (di mana memang berlaku: tanpa *kanca wingking* kehidupan dalam keluarga-keluarga akan macet sama sekali; mulai dari penyediaan makanan sampai dengan mengontrol keuangan keluarga, mengurus pendidikan maupun kesehatan anak: *kanca wingking*lah

yang melakukannya). Contoh polos patriarkat Gereja Katolik Indonesia terucap dalam “Ujud Gereja Indonesia” bulan Mei 2023—nomor dua dalam ujud-ujud Kerasulan Doa 2023: “Kita berdoa, semoga para ibu dan kaum perempuan bersedia meneladan Bunda Maria (amin!) sehingga mereka menjadi *sabar* dan *bijaksana*, *rela berkorban*, dan *percaya* bahwa karena *pertolongan Tuhan*, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin terjadi bagi kehidupan *anak-anak* dan *lingkungannya*”. Pendek kata *nrima wae* (“terima saja”, maaf, dalam bahasa Jawa).

Posisi eksekutif eksklusif urusan laki-laki, kaum perempuan hanya membantu dan melayani itu perlu didobrak tidak perlu dibuktikan lagi. Paus Fransiskus menuntutnya. Tetapi di sini saya mau fokus pada para biarawati yang merupakan “pasukan elite Katolik” luar biasa di seluruh dunia, dan juga di Indonesia. Harapan bahwa akhirnya imam dibuka juga bagi kaum perempuan, dan terutama bagi para biarawati—sebenarnya aneh bahwa komunitas-komunitas suster harus setiap hari minta pelayanan imam dari luar agar mereka dapat merayakan ekaristi—saya kesampingkan karena tidak tergantung dari kita di

Indonesia saja. Yang memutuskan penanganan tuntutan itu adalah Roma. Kiranya sudah jelas, keputusan untuk membuka imam bagi kaum perempuan hanya dapat diambil dalam sebuah konsili seluruh Gereja Katolik. Bagi saya hal itu sangat mendesak.

Para biarawati Indonesia—tak beda dengan para biarawati di seluruh dunia—sekarang sudah melakukan begitu banyak pelayanan.

Bayangkan seandainya kita tidak punya suster-suster. Apalagi di dua bidang di mana mereka memang memberikan pelayanan luar biasa: bidang kesehatan dan bidang pendidikan dasar-menengah. Akan tetapi, pelayanan-pelayanan bagus ini hanya sebagian dari pelayanan yang seharusnya dapat diberikan oleh kaum biarawati.

Sebagai contoh: dalam ordo saya Serikat Yesus di Indonesia, dari 204 imam yang aktif dan yang sudah selesai formasinya, dengan dikurangi mereka yang bertugas internal dan mereka yang berkarya di pendidikan menengah (di kolese; ini karya yang, syukur, sudah dijalankan oleh kaum biarawati), maka dari sisa sekitar 169 imam Yesuit hanya 59 bekerja dalam paroki, sedangkan 110 berkarya dalam pelbagai bidang kerasulan

“
Kalau potensi luar biasa para biarawati kita mau diaktualisasikan, mereka perlu diberi pendidikan dasar yang sama dengan para calon imam yang laki-laki. Itu serius!”

yang tidak memerlukan tahbisan. Di situ termasuk bimbingan rohani, mengajar filsafat, teologi dan ilmu-ilmu lain di perguruan tinggi, moderator mahasiswa, moderator sekian kelompok lain dalam Gereja, kerasulan kaum muda, pemberian retreat, bimbingan guru.

Apabila para biarawati terjun dalam bidang-bidang itu, dapat diperkirakan bahwa mereka akan mengembangkan karisma mereka sendiri sebagai perempuan dan mengembangkannya sesuai dengan kekhasan pendekatan perempuan. Misalnya sudah diketahui bahwa para suster mempunyai bakat khusus untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat di sekeliling, termasuk dengan masyarakat Muslim.

Sekarang perlu dipertanyakan, mengapa dari kaum biarawati kita—yang tidak kalah dengan kualitas kemanusiaan para imam—hanya satu dua orang yang studi Teologi atau menangani kerasulan lain, sedangkan kebanyakan mereka terbatas pada bidang kesehatan dan pendidikan (di mana mereka memang memberikan pelayanan yang luar biasa)? Mengapa cakupan kerasulan para suster begitu kalah dengan para imam (hal mana, itu perlu diulangi, memang masih berlaku di sebagian besar Gereja Katolik)?

Salah satu alasan adalah klerikalisme yang tak henti-hentinya dituntut agar dibongkar oleh Paus Fransiskus. Klerikalisme yang dimaksud adalah bukan hanya

pemberian sakramen-sakramen, melainkan segenap kekuasaan dan pemerintahan di semua tingkat dalam Gereja berada dalam tangan klerus tertahbis. Klerus tertahbis memang monopoli laki-laki. Secara singkat, yang menentukan apa yang harus dijalankan dan apa yang tidak dijalankan dalam Gereja adalah, secara eksklusif klerus. Para suster boleh membantu klerus melakukan tugas kerasulannya—menurut semboyan “suster melayani imam”, tetapi kebijaksanaan ditentukan oleh imam.

Sisipan

Di sini perkenankan saya sisipkan sebuah catatan. Dalam konferensi pers di pesawat terbang tiga tahun lalu, Paus Fransiskus membuka fakta bahwa ada suster-suster yang dilecehkan oleh imam, bahkan uskup. Kejadian yang menjadi terkenal adalah kasus Franco Mulakkal, Uskup Jalandar di Kerala, India yang dituduh oleh seorang suster bahwa ia memerkosanya tiga belas kali antara tahun 2014 dan 2016. Hal itu terjadi dengan sepengetahuan suster superior. Mulakkal sebentar ditahan, tetapi akhirnya dibebaskan oleh suatu Juri Pengadilan. Suster itu kemudian malah diberhentikan dari kongregasinya. Padahal, ada tiga suster lain yang juga menuduh bahwa Uskup Mulakkal melecehkan mereka secara seksual. Amat mengerikan.

Sekarang mulai dibuka sesuatu yang sebelumnya ditutup rapat-rapat, yaitu cukup sering ada suster

menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang romo, bahkan oleh seorang uskup. Baru mulai disadari bahwa suster-suster termasuk “orang rentan”: mereka lemah, tak punya suara, miskin, tidak bisa apa-apa kalau tidak diizinkan atasan mereka. Lalu suster yang menjadi korban, daripada dirangkul, dicium, didukung sepenuhnya oleh suster atasan, dan kemudian dibela dan kejahatan yang dialaminya diprotes, malah disuruh diam. Dengan akibat bahwa korban hancur. Korban lalu merasa bersalah, barangkali ada sindiran bahwa korban sendiri “menjadi penggoda” yang “memancing kejadian” (Stella Vania Puspitasari, *Rohani*, 4/2023, hlm. 59). Sebagai akibatnya, korban lalu merasa bahwa hidupnya “sudah kotor, penuh dosa, dan tidak pantas ia menjalani panggilan Tuhan” (Paul Suparno, *Rohani*, 4/2023, hlm. 65).

Rehabilitasi korban hanya mungkin, apabila korban jelas diakui sebagai korban, kejahatan yang dideritanya diprotes oleh pimpinan biara, dan pelaku kejahatan ditindak. Tidak mengakui bahwa korban menderita kejahatan menghancurkan korban. Maka, suster yang menjadi korban harus diakui sebagai korban. Komunitas tempat suster tersebut berkarya, termasuk pimpinan komunitasnya, harus menganggap pelecehan itu sebagai kejahatan terhadap komunitas serta harus diprotes dan dituntut remunerasi. Kalau uskup atau provinsial atasan peleceh tidak bereaksi, maka kejahatan harus

dibawa ke publik. Dalam Gereja Indonesia pun makin banyak pihak akan bersedia berada di pihak korban dan memberi dukungan kepadanya.

Bisa ditambahkan: kalau pelecehan berupa pemerkosaan, maka itu bukan lagi masalah internal Gereja. Pemerkosaan adalah perbuatan kriminal. Jelas, pelaku wajib dikeluarkan dari imamat dan perbuatan harus dilaporkan kepada polisi, sama seperti setiap kejahatan kriminal. Kesimpulannya: waktunya untuk bersikap, “Aduh, jangan-jangan itu sampai ketahuan di luar,” sudah lewat. Sesuai dengan *Vos Estis Lux Mundi* berpihak pada korban berarti membela korban.

Pemberdayaan Kaum Biarawati: “Kebijakan Taliban” Harus Berakhir

Kebijakan Taliban? Tentu Gereja Katolik tidak sama dengan Taliban. Taliban menolak pendidikan bagi kaum perempuan. Dalam semua lembaga pendidikan Katolik, anak-anak dan orang muda, perempuan dibantu sama dengan yang laki-laki. Akan tetapi, itu tidak lagi berlaku bagi para suster. Formasi para suster kalah jauh dengan formasi para calon imam. Misalnya, baru beberapa suster yang diizinkan belajar Filsafat dan Teologi. Pada umumnya pendidikan suster dibatasi pada pendidikan kateketik, ditambah dengan tugas yang akan diberikan kepada mereka nantinya.

Lain halnya dengan para calon imam. Mereka semua, di seluruh

dunia, berdasarkan hukum Gereja, wajib belajar Filsafat dan Teologi. Di Indonesia sepanjang tujuh tahun dalam dua tahap pelajaran Filsafat dan Teologi wajib didapatkan oleh para calon Imam, entah apa yang kemudian akan menjadi tugas mereka. Perlu diperhatikan bahwa para calon imam belajar Filsafat dan Teologi bukan agar dapat memberikan pelayanan sakramen, melainkan demi posisi mereka sebagai penyemangat dan pemimpin dalam umat Katolik dan masyarakat.

Kalau potensi luar biasa para biarawati kita mau diaktualisasikan, mereka perlu diberi pendidikan dasar yang sama dengan para calon imam yang laki-laki. Itu serius! Kalau kita mengharapkan agar para suster—seperti para imam—mau memberikan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam pelayanan Gereja, mereka harus mendapat formasi yang tidak kurang daripada yang diperoleh oleh semua calon imam. Maka, para suster pun, sama seperti para calon imam, harus belajar baik Filsafat maupun Teologi.

Dari pengalaman Gereja sejak ratusan tahun lalu, studi Filsafat dan Teologi memberikan wawasan intelektual kekatolikan dasar untuk menjadi semangat dan arahan pada umat. Saya usulkan agar semua suster, sama dengan para calon imam, belajar selama tujuh tahun Filsafat dan Teologi. Lalu akhirnya, potensi luar biasa para suster kita dapat sepenuhnya diaktifkan di dalam Gereja (kecuali—untuk

sementara—dalam pelayanan sakramen-sakramen). Lebih dari itu, kita lalu boleh mengharapkan bahwa para suster akan membawa suatu nada dan warna khusus, nada khas perempuan, dalam pelayanan-pelayanan Gereja yang sampai sekarang sepenuhnya baru diberikan oleh laki-laki, ya imam tertahbis.

Secara praktis itu berarti bahwa suster-suster kita perlu studi di fakultas dan sekolah tinggi yang sudah ada, di mana para calon imam mendapat formasi intelektualnya, dan lembaga-lembaga itu tidak akan mengalami kesulitan untuk menerima suster sebagai mahasiswa. Hanya dengan demikian para rohaniwati kita, orang yang berkualitas dan bermotivasi tinggi, dapat memainkan peranan mereka dalam Gereja yang amat kita perlukan. Situasi di mana para suster dalam Gereja memainkan peran kelas dua perlu berakhir. ♦